

**BERTAHAN HIDUP DALAM MASA YANG SULIT:  
KEHIDUPAN SEHARI-HARI MASYARAKAT TIONGHOA PADA MASA  
REVOLUSI DI SURABAYA**

***SURVIVING IN A DIFFICULT CONDITION:  
A DAILY LIFE OF CHINESE SOCIETY DURING  
THE PERIOD OF REVOLUTION IN SURABAYA***

***Noviani Mariyatul Hakim***

Depart. Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya  
Email: novhiamaryah@gmail.com

Naskah diterima tanggal 27 Agustus 2019, Naskah direvisi tanggal 8 September 2019, Naskah disetujui tanggal 2 Oktober 2019

***Abstrak***

Masa revolusi (1945-1949) merupakan salah satu periode yang mencekam dalam sejarah Indonesia. Peperangan yang terjadi selama periode ini, khususnya di Kota Surabaya dan sekitarnya telah menciptakan trauma yang dalam bagi para korbannya. Masyarakat lokal, khususnya kelompok-kelompok masyarakat minoritas seperti India dan Tionghoa berusaha mengamankan diri, mencari tempat perlindungan agar bisa bertahan hidup. Mereka yang mengungsi, merasa Kota Surabaya tidak lagi aman dan nyaman untuk ditinggali. Mereka antara lain mengungsi ke beberapa tempat yang dianggap aman seperti Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Mojokerto. Dengan menggunakan berbagai sumber seperti surat kabar, arsip, karya sastra, dan wawancara dengan berbagai narasumber, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis nasib masyarakat Tionghoa saat meletusnya perang revolusi di Kota Surabaya dan sekitarnya. Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana orang-orang Tionghoa menyiasati agar tetap bertahan hidup dalam situasi perang yang sangat tidak aman bagi mereka. Bagaimana cara mereka mencari nafkah, bagaimana mereka menjalankan kehidupan sosial-budaya dan keagamaan mereka? Apakah klenteng sebagai pusat kegiatan religi mereka, aman dari perang? Dengan kata lain, artikel ini akan melihat lebih dalam bagaimana orang-orang Tionghoa Surabaya menyiasati kehidupan mereka selama masa revolusi.

**Kata kunci:** Kehidupan sehari-hari, Tionghoa, Revolusi, Surabaya

***Abstract***

*The period of the revolution (1945-1949) was one of the extremely tense periods in Indonesian history. The wars which happened during this period, particularly in Surabaya, had created a deep trauma for its victims. Local communities, especially minority groups such as Indian and Chinese tried to secure themselves and they seek for shelters to survive. They moved to some places that they considered it would be safer, such as Malang, Pasuruan, Probolinggo, and Mojokerto. The researcher used some sources such as newspapers, archives, several literary works and interviews with authoritative. This article was aimed to describe and analyze the fate of the Chinese society during the revolutionary war in Surabaya and the vicinity. The principal question to be answered in this article was how the Chinese struggled from such threats in order to survive in a war situation. How they made a living, their social cultures, and religious. Moreover, how about the "klenteng" they used to worship, whether it was still safe or not. In other words, this article would explain much deeper how the Chinese society in Surabaya survived during the revolution period.*

**Keywords:** Daily Life, Chinese, Revolution, Surabaya

## PENDAHULUAN

*“Tanggal 10 November telah menjadi simbol abadi dalam kesadaran bangsa. Tanggal tersebut tidak hanya melambangkan sebuah peristiwa yang keras dan riil, tetapi serasa merangkul seluruh peristiwa kepahlawanan patriotik putra bangsa, dimana saja, seluruh persada tanah air.”*  
(Abdullah 1995; 1-2).

Pada awal abad ke-20, Surabaya merupakan salah satu kota utama di Indonesia yang memegang kendali penting dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam segi perekonomian, Surabaya menjadi poros industri dan penyokong roda perekonomian di wilayah sekitarnya. Adapun dari sisi sosial, Surabaya terkenal dengan penduduknya yang heterogen baik yang berasal dari orang-orang Indo maupun yang berasal dari luar daerah seperti orang-orang Tionghoa, orang-orang Arab dan Melayu. (Basundoro, 2002: 1). Hal ini diperkuat dengan adanya jalur Terusan Suez yang dibuka pada abad ke-19, sehingga mobilisasi manusia pada masa itu lebih mudah dibandingkan abad sebelumnya. Kemudahan tersebut menyebabkan banyaknya orang-orang Eropa maupun orang Asia seperti Jepang, Tionghoa, dan Melayu bermigrasi ke Surabaya (Noordjanah, 2010: 10). Salah satu etnis asing yang banyak bermigrasi dan memiliki posisi penting di Surabaya setelah orang-orang Eropa adalah orang-orang Tionghoa.

Imigran Tionghoa yang masuk ke Surabaya semakin beragam di abad ke-20. Profesi yang mendominasi pada masa itu tidak hanya dari pedagang kelas menengah dan para saudagar kaya, namun juga tukang kayu, pandai besi, dan pedagang kecil buruh, turut mewarnai kehidupan orang-orang Tionghoa di Surabaya (Husain, 2008: 5). Selain aktif dalam bidang perdagangan, orang-orang Tionghoa juga terlibat dalam dunia politik. Hal itu dibuktikan dengan didirikannya berbagai organisasi, seperti PTI (Partai Tionghoa Indonesia), TKR Chungking (Tionghoa), PMT (Palang Merah Tionghoa), dan AMT (Anggota Muda Tionghoa) (Santosa, 2014: 93-94). Organisasi Tionghoa ini berafiliasi dengan organisasi-organisasi bentukan masyarakat sipil Surabaya seperti BKR (Badan Keamanan Rakyat), BPRI (Barisan Pemberontak Rakyat

Indonesia) (Wawancara dengan Amad, 4/6/2019). Keterlibatan orang-orang Tionghoa selain di medan perang, juga berperan di bagian diplomasi di antaranya menjadi perwakilan dalam Komite Nasional, anggota Volksraad dan Indie Weerbaar.

Orang-orang Tionghoa pada paruh abad ke-20 memiliki andil yang besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya pada peristiwa 10 November 1945. Hal ini dilansir oleh penerbitan majalah Merdeka yang memperingati enam bulan kemerdekaan Indonesia pada Februari 1946 dengan judul “Pendoedoeok Tionghoa Membantoe Kita”. Salah satu isi dari majalah tersebut yang menceritakan tentang peristiwa 10 November 1945 ialah “Rakjat Tionghoa poen Insjaf akan hal ini. Dengan bekerdja bersama, bahoe-membahoe dengan bangsa Indonesia, rakjat Tionghoa toeroet berdjoeng di Soerabaja oentoek Indonesia Merdeka” (Harian Merdeka, 17/2/1946; Santosa 2014).

Radio Republik Indonesia (RRI) di Jakarta, Radio Pemberontak Surabaya dan berbagai media menyiarkan berita bagaimana orang-orang Tionghoa turut andil dalam perjuangan bersenjata dan kemanusiaan di Surabaya. Selain itu, orang-orang Tionghoa yang berasal dari luar Surabaya yang tergabung dalam AMT (Anggota Muda Tionghoa) dan Palang Biru turut membantu pertempuran-pertempuran di Surabaya pada bulan November 1945. Beberapa pemuda Tionghoa dari Malang ada yang bergabung langsung dengan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang dipimpin oleh Bung Tomo (Santosa, 2014: 94).

Menurut Shibata, seorang komandan Angkatan Laut Jepang menyatakan bahwa masa revolusi di Surabaya dimulai tanggal 2 Oktober 1945. Markas besar Embong Wungu pada pukul 10.00 WIB telah dikepung oleh 700 rakyat bersenjata. Rakyat menuntut Jepang untuk menyerahkan senjatanya (Abdulgani, 1995: 14). Pada masa ini, etnis Tionghoa seringkali dianggap mata-mata Belanda sehingga tidak jarang mendapatkan perilaku diskriminasi dari golongan bumiputra. Kedudukan etnis Tionghoa yang lemah, membuat mereka kerap dijadikan “kambing hitam” dan sasaran kesalahan. Meskipun sikap

rasial anti Tionghoa ini diupayakan oleh pihak Belanda, tidak dapat dipungkiri jika etnis Tionghoa memiliki peran yang penting dalam proses kemerdekaan Indonesia hingga pada masa revolusi (Purwanti 2011: 6).

Go Gien Tjwan yang merupakan juru bicara dari Angkatan Muda Tionghoa (AMT) menyampaikan pidato bahwa musuh rakyat Indonesia sebenarnya bukanlah etnis Tionghoa melainkan Belanda. Ia juga menyatakan bahwa orang Tionghoa juga menjadi korban penjajahan dan tidak menginginkan Belanda kembali. Hal sama juga dilakukan oleh Siauw Giok Thjan pada akhir Oktober 1945 yang merupakan pemimpin delegasi pemuda Tionghoa. Ia bertemu dengan Bung Tomo dan sejumlah tokoh dari Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) untuk membenarkan perspektif yang sebelumnya salah dipahami. Pada akhirnya pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pemuda Tionghoa dapat bergabung dengan BPRI (Barisan Pemberontak Rakjat Indonesia) dan Pesindo (Setiono, 2008: 565).

Tentara sekutu yang berdatangan diikuti dengan tentara Gurkha dari Nepal telah menghancurkan sebagian besar kota Surabaya akibat perang selama 3 minggu berturut-turut. Akibat pemboman dan perang dari Inggris tersebut, lebih dari 1000 orang Tionghoa telah menjadi korban luka-luka dan meninggal dunia. Akibatnya, orang-orang Tionghoa geram dan kemudian bergabung ke dalam pasukan bela diri di bawah bendera Tiongkok untuk melawan pasukan Inggris (Setiono, 2008: 566). Selain ikut berperang, sebagian masyarakat Tionghoa ada yang memilih bersembunyi di dalam kota dan ada yang mengungsi ke luar kota bersama orang Surabaya lainnya. Gerakan-gerakan sosial yang dibentuk oleh orang-orang Tionghoa untuk melawan penguasa Belanda, merupakan tindakan nyata bahwa etnis Tionghoa berpihak pada perjuangan orang-orang pribumi (Noordjannah, 2010).

Mengacu pada uraian di atas, maka artikel ini hendak menggambarkan dan menganalisis kehidupan sehari-hari masyarakat Tionghoa pada masa revolusi di Surabaya. Secara lebih spesifik, artikel ini

hendak menjawab dua pertanyaan penting, yakni: 1) Bagaimana orang-orang Tionghoa menyasati agar tetap bertahan hidup dalam situasi perang yang sangat tidak aman bagi mereka?; 2) Bagaimana orang-orang Tionghoa menjalankan kehidupan sosial-budaya dan keagamaan pada masa revolusi?

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang etnis Tionghoa memang telah banyak dilakukan, namun kajian yang membahas dalam lingkup kecil seperti nasib masyarakat Tionghoa di Surabaya pada masa revolusi masih terbatas. Pada umumnya, pembahasan di beberapa buku maupun jurnal hanya menyinggung peran etnis Tionghoa dalam kehidupan perekonomian. Oleh sebab itu, kajian yang bersifat *daily life* ini bertujuan untuk mengisi ruang kosong tersebut. Berikut adalah beberapa kajian tentang orang-orang Tionghoa pada masa revolusi adalah:

Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran (Sejak Nusantara sampai Indonesia) karya dari Iwan Santosa (2014). Buku ini membahas tentang hubungan Tiongkok dengan Nusantara (Indonesia) sejak masa kerajaan, peran orang-orang Tionghoa pada masa revolusi yang membantu masyarakat Indonesia berjuang melawan kolonialisme, dan orang-orang Tionghoa dalam tubuh TNI (pasca Indonesia merdeka). Periode yang digunakan dibuka ini diakhiri pada konflik yang terjadi di tahun 1967. Pembahasan khusus tentang nasib dan peran orang Tionghoa di Surabaya diuraikan secara umum di buku ini, namun hal tersebut telah memberikan gambaran cukup penting bagi penulis untuk memahami nasib dan peran orang-orang Tionghoa pada masa revolusi.

Karya Benny G. Setiono (2008) yang berjudul Tionghoa dalam Pusaran Politik (Mengungkap Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia) ialah buku yang mengupas lengkap keberadaan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Buku ini memaparkan bagaimana kedatangan awal orang Tionghoa ke Indonesia, peran orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia mulai sebelum abad ke-16 hingga rezim orde baru. Uraian yang disampaikan Benny dalam buku ini

bermanfaat bagi penulis untuk merekonstruksi kajian tentang Tionghoa di Surabaya.

Buku lain yang membahas tentang pertempuran di Surabaya adalah Pertempuran Surabaya 1945, karya dari Soehario Padmodiwirio (2012) atau yang lebih sering dikenal dengan panggilan Hario Kecik. Pembahasan awal dimulai dengan masa perjuangannya pasca Indonesia merdeka di tahun 1945. Sosok Hario yang merupakan pendiri PTKR (Polisi Tentara Keamanan Rakyat) dibahas dalam buku ini hingga kiprahnya disetiap peristiwa yang terjadi di Surabaya. Meletusnya revolusi yang melibatkan berbagai massa untuk turut melawan pasukan Inggris ditulis secara detail pada buku ini. Aksi angkat senjata, pengorganisasian kampung hingga Gerakan mundur strategis yang dilakukan oleh Arek Suroboyo. Buku ini lebih mirip otobiografi, yang mana pihak “aku” menjadi lakon utama dan hasil tulisan ini berdasarkan pengalaman nyata yang pernah dialami Hario selama masa revolusi di Surabaya. Perbedaan buku dengan penelitian ini adalah sangat sedikit pembahasan yang menjelaskan nasib orang Tionghoa pada masa revolusi. Buku ini lebih menekankan dan menggambarkan para pejuang yang tergabung dari berbagai laskar untuk mempertahankan kemerdekaan.

Frank Palmos (2016) menulis buku yang berjudul Surabaya 1945, Sakral Tanahku yang kemudian diterjemahkan oleh Johannes Nugroho. Buku ini menjadi salah satu pedoman yang penting bagi penulis untuk merekonstruksi sejarah revolusi yang terjadi di Surabaya dan melengkapi data penelitian ini. Pembahasan didalam buku ini tidak hanya menitikberatkan masa revolusi, Frank juga menjelaskan di beberapa bab sebelumnya mengenai kondisi Surabaya pada masa depresi ekonomi dunia hingga kekalahan Jepang pada tahun 1945. Bahasanya yang ringan memudahkan para pembaca untuk memahami sifat arek Suroboyo pada masa itu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap. Tahap pertama yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan sumber. Sumber-sumber yang

didapat berasal dari surat kabar seperti Asia Raya dan Pelita Rakjat. Selain surat kabar, penulis juga memperoleh sumber dari hasil wawancara seperti Edy Samson (Ketua Perkumpulan Indo-Belanda di Surabaya dan pelaku sejarah), Lie Tjio Wee (pelaku sejarah), Djuneo (pelaku sejarah), Amad (anggota Heiho, BPRI dan TKR), Yusuf Sirad (BKR laut), Oei Hiem Hwei (pelaku sejarah). Selain itu, penulis juga menggunakan sumber dari beberapa karya sastra, skripsi maupun buku penunjang lainnya. Selanjutnya ialah tahap kritik sumber (verifikasi), sumber-sumber yang berhasil diperoleh, baik arsip atau informasi yang diambil dari terbitan sezaman, dipilah sesuai tema dan kebutuhan penulis. Setelah itu dilakukan proses analisis data dan terakhir dituangkan dalam bentuk tulisan (historiografi).

## **HASIL PEMBAHASAN**

### ***Sekutu dan orang-orang Tionghoa***

Kedatangan pihak sekutu yang dipimpin oleh tentara Inggris ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, merupakan awal meletusnya perang yang di kemudian hari dimenangkan oleh pihak sekutu. Kemenangan tersebut tentunya bukan hal yang mudah didapatkan oleh pihak Inggris. Ketegangan kota semakin meningkat ketika Inggris datang bersama pasukan India dan membonceng pasukan Belanda. Pada bulan ini, berbagai pertempuran pecah di jalan-jalan maupun kampung Surabaya antara Barisan Pemuda Republikan (BPR) dengan orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang, orang-orang Tionghoa, orang-orang Indo-Belanda dan orang-orang Jepang (Toer dkk, 1999: 80; Setiono 2008: 563; Purwanti, 2011: 62).

Terdapat sebuah fakta yang menarik terkait “rampasan” senjata Jepang dan berbeda dari pengetahuan umum yang beredar sebelumnya. Masyarakat Surabaya yang didalamnya terdiri atas berbagai macam suku telah menemukan gudang persenjataan Jepang di panti asuhan Don Bosco, yang terletak di jalan Tidar. Hal ini menunjukkan bahwa persenjataan lengkap yang didapatkan oleh masyarakat Surabaya sewaktu berperang tidak selalu berasal dari hasil rampasan. Ketika

Jepang menyerah pada sekutu ditahun 1945, pihak Jepang memang sengaja meninggalkan semua peralatan perang dan kendaraan mereka di negeri jajahannya. Hal ini tentunya dilakukan untuk tidak memicu pertikaian kembali antar negara, khususnya antara pihak Jepang dengan Belanda, dan kesempatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh tentara-tentara Surabaya, diantaranya terdapat BKR dan mantan Heiho yang turut mengambil senjata perang ini (Wawancara dengan Amad, 4/6/2019).

Seperi lazimnya perjuangan, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung tetapi juga ada sebagian kelompok yang justru melakukan pengkhianatan atas perjuangan tersebut. Demikian pula dengan orang-orang Tionghoa, sebagian dari mereka ada yang setia pada perjuangan bangsa Indonesia karena merasa telah lama tinggal dan dibesarkan di Surabaya, dan sebagian ada yang membelot. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa terhadap kelompok (bangsanya) sendiri sudah terjadi sejak zaman Jepang. Mereka menjadi kaki tangan Jepang untuk mendapatkan kedudukan dan kesenangan bagi diri sendiri. sebanyak 13 orang yang dianggap sebagai pengkhianat ditahan dalam pengawasan BKR (Soeara Rakyat, 19/10/1945). Pengkhianatan pun kerap terjadi pada masa revolusi, mereka memihak kepada Belanda demi mempertahankan keamanan keluarga mereka agar tidak diganggu. Hal ini mereka lakukan juga demi keberlangsungan hidup mereka di Surabaya (Wawancara dengan Sirad, 12/6/2019).

Perang semasa revolusi, terkadang harus membuat para pemuda Tionghoa mengangkat senjata melawan para anggota komunitasnya sendiri yang dirasa juga menentang pendirian RI. Di beberapa kasus, terdapat orang-orang Tionghoa yang secara terbuka mendukung kembalinya Belanda melalui NICA dipukuli dan dibunuh, sedangkan “tersangka” lainnya diperlakukan secara kasar ketika diinterogasi oleh para pejuang Republik. Pada bulan Oktober 1945, sekelompok pemuda Tionghoa yang dipimpin Hadi Manuk dari Kapasan meminta Hasanuddin dan Suhario untuk mengabdikan

permintaan mereka berupa “pembersihan” komunitas Tionghoa dan penyediaan sarana transportasi yang diperlukan untuk operasi tersebut. Proses pembersihan tersebut diawali dengan dituduhnya orang-orang Tionghoa dari rumah dan toko-toko mereka, yang dicurigai sebagai “tersangka” mata-mata Belanda dan yang dianggap berpihak pada kaum Indo-Belanda, maupun warga sipil Belanda. Cara yang dipakai untuk pembersihan ini dinilai tidak efektif karena rentan penyalahgunaan, misalnya untuk menindas orang yang tidak mereka sukai atau terjadi salah tuduh. Namun terdapat sebuah fakta bahwa memang ada beberapa oknum Tionghoa yang membelot anti Republik. Mereka bersembunyi dibelakang garis pertempuran dan menjadi penembak misterius. (Padmodiwiryo, 1995: 56,73, 137; Palmos, 2016: 285-288).

Ketika perang revolusi meletus, terdapat penduduk sipil termasuk orang-orang Tionghoa yang memilih mengungsi. Rumah-rumah orang Tionghoa kaya sebagian besar yang memiliki toko dialihfungsikan pada penjaga bayaran untuk menjaga rumah mereka selama ditinggalkan. Namun, beberapa diantaranya juga tidak ikut mengungsi karena merasa “terbebani” jika harus meninggalkan harta mereka yang berada di Surabaya. Seperti yang telah diketahui, bahwa masyarakat Tionghoa sejak zaman Belanda telah melanggengkan kekuasaannya dengan bekerja di sektor perdagangan, sehingga bukan tergolong hal baru jika terdapat sebagian masyarakat Tionghoa tidak mau mengungsi keluar dari Surabaya. Mereka memilih bersembunyi ditengah kekacauan yang berlangsung di Surabaya (wawancara dengan Amad, 4/6/2019).

### ***Proses Pengungsian dan Galangan Dana***

Sebagian dari mereka yang tidak dapat bertahan di Surabaya, akhirnya memilih mengungsi sebagai jalur alternatif lain. Proses pengungsian tersebut mendapatkan galangan dana salah satunya dari pembentukan Panitia Amal Tionghoa. Panitia Amal Tionghoa ini merupakan kepanjangan tangan dari Palang Merah yang bertugas untuk mengurus segala

kepentingan pengungsi yang berasal dari dalam Surabaya. Demi keberlangsungan hidup dan nasib para pengungsi Tionghoa, berbagai perkumpulan dari Tionghoa mewakilkan anggota kelompoknya untuk mengikuti rapat gabungan dan menentukan Panitia Amal Tionghoa. Rapat pembentukan Panitia Amal Tionghoa dilakukan pada tanggal 21 November 1946, jam 10 pagi di gedung Tiong Hwa Siang Hwe yang terletak di jalan Kembang Djepoen 25 (Pelita Rakjat, 20/11/1946).

Panitia Amal Tionghoa di tahun sebelumnya juga telah memberikan dana untuk menyokong keluarga-keluarga pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tiga perwakilan dari Panitia Amal Tionghoa yakni Oei Chiao Liong, Tsao Te Chung dan Djie Tjhiang Than menemui Gubernur Jawa Timur dan Residen Surabaya untuk memberikan uang tunai sebesar f 100.000. sumbangan ini merupakan sumbangan pertama dari orang-orang Tionghoa di Surabaya yang harapannya bagi mereka dapat tersalurkan dengan baik dan teratur melalui jalur pemerintah. Selain itu, masyarakat Tionghoa juga melakukan pemungutan derma (sedekah) bagi mereka yang mampu. Kepedulian mereka terhadap sesama tercermin dalam sikap mereka yang bahu membahu membantu saudaranya baik dari segi finansial maupun kebutuhan lainnya (Soeara Rakjat, 7/11/1945).

Proses pengungsian yang lainnya dilakukan dengan serba apa adanya. Kondisi orang-orang Tionghoa hampir sama dengan kondisi masyarakat sipil pada umumnya, sebagian dari mereka meninggalkan rumah untuk mencari tempat berlindung yang aman di luar kota. Perjalanan tersebut ditempuh dengan berjalan kaki, menggunakan cिकार atau gerobak dorong dan tentunya tidak disertai dengan barang bawaan yang banyak. Pakaian yang dibawa lebih sering hanya yang melekat di tubuh. Orang-orang banyak yang kehilangan keluarga, harta, dan tempat tinggal. Hal ini seperti yang terjadi di Malang, yang merupakan salah satu kota tujuan bagi para pengungsi untuk menampung mereka yang terdampak perang.

Secara geografis, kondisi Malang memiliki bentang alam yang luas dan dikelilingi pegunungan sehingga hal ini menguntungkan para gerilyawan untuk melaksanakan taktik perang mereka secara strategis. Meskipun di Malang juga terjadi pertempuran, di wilayah Malang Selatan masih tergolong aman dan peperangan hanya terjadi di beberapa titik pusat kota. Disamping itu, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masih tergolong cukup karena dapat mengambil dari hasil alam yang melimpah seperti umbi-umbian yang tumbuh di pekarangan rumah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab para pengungsi Surabaya datang ke daerah dalam (Malang) untuk mengamankan diri. Sama halnya yang terjadi di Surabaya, para pengungsi Malang menempati rumah-rumah kosong yang ditinggal oleh penghuni aslinya kemudian berpindah dari satu rumah ke rumah lain jika kondisi dianggap sedang tidak aman (wawancara dengan Oei Hiem Hwei, 18/5/2019).

Bagi orang-orang Tionghoa yang tidak mengungsi, mereka memilih bersembunyi di balik rumah mereka dan menjadi orang-orang yang tertutup. Mereka juga tidak terjun ke medan perang karena tidak memiliki keahlian khusus, sehingga mereka hanya menggantungkan nasib lewat doa (wawancara dengan Lie Tjio Wee, 3/5/2019). Sama seperti masyarakat Surabaya, Orang-orang Tionghoa juga mendirikan tempat “perlindungan” di daerah tempat tinggal mereka untuk melindungi diri ketika pertempuran sedang terjadi. Perlindungan tersebut berbentuk lubang tanah yang besar, yang dapat memuat lebih dari 5 orang. Tanda sirine akan berbunyi keras jika kondisi telah mencapai batas gawat darurat, dan merupakan pertanda bahwa orang-orang harus segera bersembunyi mencari tempat perlindungan yang aman. (wawancara dengan Djuneo, 3/5/2019). Selama pertempuran masih terus terjadi, orang-orang yang berada dalam kawasan Surabaya (terutama penduduk sipil) selalu membawa kapas dan karet ke manapun mereka pergi. Kapas diletakkan dalam telinga dan karet berfungsi untuk digigit. Ketika suara ledakan-ledakan bom maupun meriam di

sekitar mulai bergemuruh, dua barang tersebut akan mereka gunakan untuk melindungi diri supaya gendang telinga mereka tidak pecah dan lidah tidak putus (wawancara dengan Eddy Samson, 26/6/2019).

### ***Cara Bertahan Hidup dan Perlawanan masyarakat***

Selain memimpin garis-garis depan, orang-orang Tionghoa juga mendirikan Palang Biru yang membantu mengevakuasi korban yang terluka. Palang Biru merupakan bentukan pasukan Tionghoa yang berasal dari Malang. Palang Biru bertugas sebagai tenaga medis dan memiliki peran yang sama seperti Palang Merah Tionghoa yang berasal dari Surabaya dan Malang (Wawancara dengan Oei Hiem Hwei, 18/5/2019). Anggota Palang Biru mengangkut korban pertempuran Surabaya ke garis belakang Mojokerto yang pada saat itu dikuasai penuh oleh pasukan Republik Indonesia. Palang Biru dipercayai juga dalam mengatur pemberangkatan kereta api Palang Merah yang berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya (Santosa, 2014: 95). Dua organisasi ini yang kemudian juga memiliki tugas untuk memasok ransum bagi para pemuda yang berjuang di garis depan.

Pembagian ransum juga dilakukan melalui dibentuknya dapur umum di beberapa daerah Surabaya. Ibu-ibu kampung dan remaja perempuan biasanya yang bertugas memasak di dapur umum lalu membagikannya ke masyarakat sekitar. Proses pengorganisasian ini dilakukan tanpa paksaan dan bahan-bahan pokok yang didapatkan berasal dari hasil sukarelawan. Hal demikian juga bisa terjadi di kalangan orang-orang Tionghoa. Sebagian orang Tionghoa yang tinggal di kampung, mereka juga mendapatkan ransum. Namun untuk orang-orang Tionghoa yang membelot, mereka mendapatkan jatah makanan dari dapur Belanda seperti roti (Wawancara dengan Amad, 4/6/2019; Wawancara dengan Yusuf Sirad, 12/6/2019). Orang-orang Tionghoa dan organisasi-organisasi Tionghoa juga membantu memberikan sokongan berupa bahan-bahan makanan. Selain itu juga turut serta memberikan kontribusi finansial dan donasi pada badan-badan perjuangan, seperti

uang, komoditi, dan perkakas rumah tangga (Purwanti, 2011: 77).

Contoh dari organisasi Tionghoa yang dibentuk oleh orang-orang Tionghoa adalah Panitia Keamanan Rakyat, yang beberapa pendirinya bernama Tan Tjong Giok, Oe Chao Liong, Tan Tjan Gwan dan Sardjono. Panitia Keamanan Rakyat bertugas menolong rakyat berupa membagikan makanan dan menjaga kesehatan kota. Pembagian makanan dilakukan karena pasar-pasar masih banyak yang tutup meskipun upaya-upaya terhadap pembukaan pasar telah dilakukan di segenap kota, kecuali pasar Pabean dan pasar Pegirian. Adapun bentuk penjagaan kesehatan kota yang dimaksud adalah memakamkan orang-orang yang baru saja meninggal atau mayatnya masih terlantar di jalan-jalan. Badan ini juga telah membangun suatu badan polisi sementara yang diberi nama dengan AMP, fungsinya untuk membantu MP Inggris dalam hal penjagaan keamanan. Keamanan di Surabaya tergolong rendah karena meskipun tentara Inggris telah menduduki Surabaya, Surabaya masih mendapatkan serangan dari kaum pemberontak luar Surabaya. Oleh sebab itu Panitia Keamanan Rakyat bekerja keras ditengah-tengah dentuman mortir. Mereka terus menjalankan pekerjaannya demi kecintaan mereka terhadap penduduk kota yang masih tinggal.

Perampokan juga terjadi dibanyak tempat, baik di rumah-rumah yang kosong maupun di gudang-gudang yang belum dapat pengawasan dari Inggris. Perampokan yang dimaksud adalah perampokan bahan-bahan makanan terutama beras. Hal ini terjadi karena pada masa revolusi, masyarakat khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan takut mati. Kemudian Panitia Keamanan Rakyat merampas beras-beras yang ditimbun oleh warga dalam rumahnya termasuk juga mengambil beras-beras yang ada di rumah kosong (ditinggal pemiliknya mengungsi). Kemudian beras-beras itu akan dikumpulkan bersama dengan beras-beras yang lama. Beras-beras tersebut akan dibawa ke kantor yang terletak di Jalan Kembang Jepun 25 untuk dibagikan ke warga yang masih tinggal secara adil, dengan perantaranya kepala lingkungan.

Pekerjaan ini juga dilakukan atas kerja sama dengan SBOK dan Rapwi untuk menolong kehidupan penduduk (Pelita Rakjat, 20/11/1946).

Pada aktivitas keagamaan, orang-orang Tionghoa masih dapat melakukan kegiatan ibadah di tempat peribadatnya. Bangunan peribadatan pada masa revolusi masih dipertahankan oleh pihak sekutu sehingga penduduk sipil maupun kaum minoritas seperti etnis Tionghoa masih dapat melakukan aktivitas keagamaan mereka. Namun dikarenakan kondisi yang belum stabil, banyak orang Tionghoa yang lebih memilih sembunyi di rumah daripada keluar untuk beribadah.

Disisi lain, bangunan peribadatan seperti masjid dan klenteng tidak hanya sebagai tempat keagamaan namun juga sebagai tempat berkumpulnya dari berbagai elemen masyarakat untuk sembunyi dari serangan pihak sekutu (Wawancara dengan Amad, 4/6/2019). Pada masa genting seperti ini masyarakat tidak mempedulikan kepercayaan (agama) orang lain yang berbeda. Dentuman-dentuman peluru yang terus menghujani rakyat telah menyita banyak perhatian mereka untuk melarikan diri, mencari tempat perlindungan, dan bertahan hidup ditengah desingan peluru. Siapapun yang ingin selamat, baik dari golongan Tionghoa maupun masyarakat Surabaya asli, maka harus bersembunyi untuk berlindung. Secara naluri, mereka berlindung ke langgar-langgar, masjid dan tempat-tempat yang diperkirakan aman dari serbuan musuh walaupun tidak menutup kemungkinan peluru-peluru akan menasar ke sana (Herawati, 2018: 61)

Aksi gelombang protes dan perlawanan yang terjadi di periode Oktober-Desember 1945 merupakan hal yang tidak pernah dilupakan oleh penduduk Surabaya, termasuk orang-orang Tionghoa. Jalur diplomasi dan perundingan tidak akan cukup untuk mempertahankan kemerdekaan, hingga pada tanggal 2 Desember 1945 para pejuang bersenjata Surabaya melakukan gerakan mundur serentak. Gerakan ini disebut dengan bumi hangus yang merupakan strategi perjuangan mereka. Sebelum mengungsi ke

luar kota, para pejuang menghancurkan segala apapun yang dirasa menguntungkan musuh serta tidak bisa dibawa atau diungsikan keluar kota. Barang-barang yang diungsikan tidak hanya yang berhubungan dengan militer dan bahan kimia, namun bahan-bahan farmasi seperti peralatan bedah dan obat-obatan. Berbagai persenjataan telah disembunyikan di Madura dan kemudian dipindahkan ke daerah Mojokerto, Malang, Kediri, Madiun dan tempat-tempat lain di Jawa Timur (Kecik, 2012: 232; Alwi, 2012: 431).

Gerakan mundur masyarakat Surabaya sebagian besar dilakukan pada malam hari karena untuk menghindari adanya serangan udara, pemboman dan penembakan. Hal ini juga termasuk dalam pemindahan korban dan alat-alat kesehatan. PMI (Palang Merah Indonesia) memindahkan para penderita ke rumah sakit Lamongan, Madiun, Malang, Kediri, Jombang, Kertosono dan tempat lainnya yang mana penanggungjawab pengelolaan diserahkan pada dokter Suwandi (Kecik 2012: 232; Alwi, 2012: 431).

### ***Nasib dan Pemulangan Para Pengungsi***

Pengungsian bagi para korban, termasuk orang-orang Tionghoa juga telah dilakukan sebelumnya saat Inggris melakukan pemboman di Surabaya pada bulan November 1945. Banyaknya korban yang jatuh, tentunya berimplikasi terhadap daya tampung Rumah Sakit sehingga harus dialihkan ke rumah sakit yang berada di luar kota Surabaya. Rumah sakit Karangmenjangan, RS William Booth, RS Khatolik, RS Sipil Jepang dan RS AL Jepang di Undaan kebanjiran pasien. Selain itu, rumah sakit juga dihadapkan dengan masalah lainnya seperti kurangnya staf perawat, obat-obatan dan peralatan medis. Pengungsian akhirnya dilakukan oleh Dr. Soetopo dengan memindahkan pasien keluar kota daerah Malang, Jombang dan Sidoarjo menggunakan truk, ambulans dan pedati. Kemudian dilanjutkan pemindahan ke Mojokerto, Mojowarno dan Jombang dengan menggunakan kereta api (Padmodiwiryo, 1995: 132, 244; Pamos, 2016: 293-294).

Ketika kekuasaan kembali dipegang oleh pihak Belanda pada tahun 1946, keadaan Surabaya mulai membaik dimana orang-orang

yang mengungsi mulai berdatangan kembali ke Surabaya. Pengangkutan para pengungsi telah dilakukan pada bulan November 1946 dengan merencanakan alur perjalanan melalui Mojokerto, karena wilayah Mojokerto merupakan salah satu tempat yang aman, dimana pihak sekutu tidak dapat meminjamkan kapal (Pelita Rakjat, 21/11/1946). Pengungsi Tionghoa rombongan pertama yang telah sampai di Surabaya menggunakan kapal Nansin Maru pada tanggal 13 November, berhak mendapatkan jatah beras mulai tanggal 14 November sampai 21 November 1946. Pembagian beras dilaksanakan mulai jam 9 pagi hingga jam 12 siang di kantor lingkungan yang terletak di jalan Peneleh 60-62. Sedangkan untuk pembagian beras selanjutnya, mereka akan mendapatkan langsung dari masing-masing kepala sektor (Pelita Rakjat, 18/11/1946).

Keselamatan para pengungsi Tionghoa rombongan pertama ini telah dijamin oleh Pengurus Amal Tionghoa mulai dari persoalan makan hingga rumah. Sebanyak 649 jiwa terdiri atas orang tua dan anak-anak diberangkatkan dari pelabuhan Probolinggo, dan merupakan pengungsi dari daerah Probolinggo, Pasuruan dan Lumajang (Pelita Rakjat, 16/12/1946). Panitia Amal Tionghoa berupaya keras menyiapkan keperluan pengungsi ketika tiba di Surabaya. Diantaranya, mereka membentuk seksi penyambutan (transportasi) untuk mendukung akses mobilisasi para pengungsi. Mereka juga mengurus barang-barang bawaan para pengungsi. Setiap anggota diberi tanggung jawab untuk mengurus bagian kesehatan, ransum makanan hingga rumah para pengungsi.

Bagi para pengungsi yang tidak memiliki tempat tinggal, disediakan kamp sementara selama 10 hari. Jika melewati batas hari tersebut, maka Panitia Amal Tionghoa akan menyerahkan ke badan komisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Disamping itu para pengungsi akan dibantu mencari pekerjaan dan keperluan lainnya. Pengumpulan uang melalui penggalangan dana bagi orang-orang Tionghoa juga dimarakkan kembali, karena sekitar 10% dari para pengungsi tersebut

memerlukan pertolongan (Pelita Rakjat, 19/12/1946).

Pemulangan para pengungsi yang terlaksana di bulan berikutnya, sekitar 664 jiwa yang sebelumnya mengungsi di Prigen, Kepanjen, Kerebet, Dampit, Batu, dan Malang dipulangkan ke Surabaya menggunakan kapal Yaji Maru. Sebagian besar pengungsi Tionghoa ini tergolong tidak mampu. Ketika para pengungsi telah tiba di Surabaya, terlebih dahulu mereka akan dibawa ke rumah Tjoa Sie Lian di Kembang Jepun dan kemudian akan diantarkan ke rumah masing-masing. Namun pada kenyataannya, 176 orang tidak memiliki tempat tinggal sehingga solusi yang ditempuh sementara adalah menampung para pengungsi ke beberapa tempat. Sebanyak 106 orang ditempatkan dalam asrama di jalan Peneleh 48 dan yang lainnya ditempatkan di rumah-rumah kosong yang berada di jalan Plampitan gang 11. Proses pemulangan orang-orang Tionghoa rombongan kedua ini dipimpin oleh Tuan Kwee Hway Pang, Dr. Gan Sing Bie dan Dr. Phwa Biauwi Hiang. Mereka bertugas juga sebagai penjamin kesehatan, namun persediaan obat tetap tidak mencukupi kebutuhan para pengungsi (Pelita Rakjat, 27/12/1946).

Ketiadaan tempat tinggal diperparah juga dengan kondisi para pengungsi yang menyedihkan. Diantara pengungsi tersebut terdapat orang-orang tua yang lumpuh, penglihatannya telah kabur dan ditambah lagi dengan kehadiran seorang wanita yang pikirannya setengah gila. Berbagai permasalahan yang hadir harus ditangani dengan kesabaran yang luar biasa. Berdasarkan catatan pendaftaran paling belakang, jumlah penduduk Tionghoa yang mengungsi di Malang mencapai 5149 orang dan di daerah Jawa Timur lain terdapat 6118 orang, sehingga sebanyak 11.267 orang harus dipulangkan ke Surabaya. Proses pemulangan para pengungsi tersebut baru terlaksana sekitar 4000 orang, sehingga masih ada 7000 orang Tionghoa yang masih tertinggal (Pelita Rakjat, 27/12/1946).

Pemulangan pengungsi Tionghoa asal Surabaya terus dilaksanakan pada akhir tahun 1946. Pengungsi Tionghoa yang akan

dipulangkan merupakan warga asal daerah dalam, yakni 655 dari Malang dan 69 dari daerah Probolinggo. Proses pemulangan orang-orang Tionghoa ini menggunakan kapal Yaji Maru yang dipimpin oleh Toean Liem Bian Sioe dan Dr. Ganseng An selaku bagian kesehatan. Orang yang ahli dalam bidang kesehatan memiliki peran yang penting selama proses pengungsian berlangsung. Mereka dapat merawat pengungsi yang sakit dan membantu orang melahirkan di atas kapal. Kapal menjadi salah satu alat transportasi yang penting untuk mengangkut orang banyak pada masa itu. Kapal Yaji Maru tiba di Surabaya pada pukul 9 pagi dan mengangkut rombongan ketiga (Pelita Rakjat, 30/12/1946).

Pada tahun 1947, aktivitas sosial ekonomi berangsur pulih seperti sekolah-sekolah dan pasar di Surabaya telah dibuka kembali. Pasca perjanjian Renville, Surabaya berada dibawah kekuasaan Belanda. Kehidupan terus membaik dan keadaan Surabaya setelah tahun 1946 sudah tidak diwarnai dengan konflik bersenjata lagi. Pasukan asing mulai mengendalikan keamanan kota hingga diakuinya kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949. Para pengungsi berdatangan dan berani ke kota untuk kembali ke rumah mereka. (Basundoro, 2014: 443; Wawancara dengan Eddy Samson, 26/6/2019). Puncak perubahan tersebut dibuktikan dengan hasil Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, pada 2 November 1949. Keputusan tersebut diantaranya berupa penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dari tangan pemerintah kerajaan Belanda (Poerwanto, 1997: 89).

## **PENUTUP**

Keberadaan orang-orang Tionghoa di Surabaya telah berlangsung sejak lama. Pada abad ke-20 orang-orang Tionghoa memiliki peranan yang penting dalam roda perekonomian di Surabaya, khususnya di sektor perdagangan. Selain menjalani aktivitas berdagang sehari-hari, mereka juga turut andil berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Orang-orang Tionghoa ikut bergabung dalam dunia politik, diantaranya

menjadi anggota dewan rakyat (Volksraad) dan mendirikan organisasi-organisasi seperti PTI (Partai Tionghoa Indonesia), TKR Chungking (Tionghoa), PMT (Palang Merah Tionghoa), dan AMT (Anggota Muda Tionghoa). Organisasi Tionghoa ini juga berafiliasi dengan organisasi-organisasi bentukan masyarakat sipil Surabaya seperti BKR (Badan Keamanan Rakyat), BPRI (Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia). Organisasi-organisasi inilah yang kemudian berjuang bersama melawan sekutu.

Orang-orang Tionghoa selain berjuang di garis depan menjadi tentara yang pro-republik, juga ada yang bersembunyi di dalam rumah selama pertempuran berlangsung dan mengungsi keluar kota. Mereka lebih memilih mencari tempat perlindungan yang aman bagi diri dan keluarga mereka. Kehidupan orang-orang Tionghoa sama dengan kehidupan masyarakat sipil lainnya. Mereka diliputi perasaan ketakutan dan kekhawatiran dari hari ke hari. Cara mereka bertahan hidup ialah dengan mengandalkan bantuan kebutuhan makanan dari dapur umum, sukarelawan, maupun lembaga khusus Tionghoa seperti Panitia Keamanan Rakyat. Sedangkan pada aktivitas keagamaan, mereka lebih memilih tidak pergi ke tempat ibadah karena kondisi lingkungan yang belum stabil. Bangunan-bangunan peribadatan seperti masjid dan klenteng-klenteng memang tidak dihancurkan, oleh sebab itu sering digunakan oleh masyarakat Surabaya, termasuk orang-orang Tionghoa untuk melindungi diri meskipun tidak menutup kemungkinan peluru-peluru akan tetap menysasar ke bangunan tersebut.

Kehidupan di Surabaya selama bulan Oktober-Desember 1945 sangat sulit. Perekonomian mati total, pasar dan sekolah-sekolah ditutup akibat pertempuran yang terus berlangsung selama beberapa bulan tersebut. Kondisi tersebut kemudian mulai membaik ketika pasukan Inggris meninggalkan Surabaya dan kekuasaan kembali diambil alih oleh Belanda. Para pengungsi Tionghoa di tahun 1946 mulai datang kembali ke Surabaya. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki tempat tinggal ditambah lagi dengan keadaan para pengungsi yang menyedihkan, seperti

tidak memiliki pekerjaan dan berusia lanjut. Lembaga-lembaga Tionghoa akhirnya berupaya menghimpun dana agar bisa menyokong kebutuhan hidup para pengungsi terutama dalam segi pangan. Pada tahun 1947, keadaan telah pulih dan aktivitas perekonomian masyarakat hidup kembali. Hal ini terus berlanjut baik hingga tahun 1949, ketika hasil KMB diputuskan pada tanggal 2 November yang salah satunya berisi penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia membagi pengalaman dan pengetahuannya kepada penulis sehingga artikel ini dapat diselesaikan. Mereka adalah Edy Samson (Indo-Belanda), Amad (anggota BPRI dan TKR), Yusuf Sirat (BKR Laut), Oei Hiem Hwei (Pelaku Sejarah), Lie Tjio Wee (Pelaku Sejarah). Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Terakhir, penulis berterima kasih kepada staf Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang telah berjasa atas terwujudnya tulisan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### *Buku, Jurnal dan Skripsi*

- Abdulgani, Roeslan. 1995. *Seratus Hari di Surabaya yang Menggemparkan Indonesia*. Jakarta: Jayakara Agung Offset.
- Alwi, Des. 2012. *Pertempuran Surabaya November 1945 (Catatan Julius Pour: Mallaby Dibunuh atau Terbunuh?)*. Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Basundoro, Purnawan. *Penduduk dan Hubungan Antar Etnis di Kota Surabaya Pada Masa Kolonial*. Paramitha Vol. 22 No. 1. (2012).
- Basundoro, Purnawan. *Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya*

- 1900-1960-an*. Masyarakat Indonesia Vol. 38 no. 12. (2012).
- Herawati, Zoya. 2018. *Jamaloke*. Lamongan: Pagan Press.
- Husain, Sarkawi B. (2008, Juli). *Pasang Surut Pembaruan di Surabaya*. Makalah di presentasikan di Seminar Pembaruan di Graha Sawunggaling Pemerintah Kota Surabaya.
- Kecik, Hario. 2012. *Pertempuran Surabaya 1945*. Sleman: Abhiseka Dipantara.
- Noordjanah, Andjarwati. 2010. *Komunitas Tionghoa di Surabaya 1910-1946*. Yogyakarta: Ombak.
- Padmodiwiryo, Suhario 1995. *Memoar Hario Kecik: Autobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Palmos, Frank. 2016. *Surabaya 1945 Sakral Tanahku*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Purwanti, Nunik. 2011. *Etnis Tionghoa pada Masa Revolusi 1945-1949*. Skripsi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga Surabaya.
- Poerwanto, Heri. 1997. *Dinamika Komunitas Keturunan Cina di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Pramoedya, Koesalah dan Ediati Kamil. 1999. *Kronik Revolusi Indonesia Jilid I*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Santosa, Iwan. 2014. *Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran: Sejak Nusantara sampai Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara bekerja sama dengan Yayasan Nabil.
- Setiono, Benny G. 2008. *Tionghoa dalam Pusaran Politik (Mengungkap Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia)*. Jakarta: TransMedia.
- Koran**
- Berdjoang*, 18 November 1946
- Harian Merdeka*, 17 Februari 1946
- Pelita Rakjat*, 18 November 1946
- Pelita Rakjat*, 20 November 1946
- Pelita Rakjat*, 21 November 1946
- Pelita Rakjat*, 27 Desember 1946
- Pelita Rakjat*, 30 Desember 1946

*Pelita Rakjat*, 16 Desember 1946  
*Pelita Rakjat*, 19 Desember 1946  
*Soeara Rakyat*, 19 Oktober 1945  
*Soeara Rakyat*, 7 November 1945

**Wawancara**

- Wawancara dengan Lie Tjio Wee (86 tahun) di Tambak Bayan Surabaya, 3 Mei 2019.
- Wawancara dengan Ibu Djuneo (86 tahun) di Tambak Bayan Surabaya, 3 Mei 2019.
- Wawancara dengan Oei Hiem Hwei (84 tahun) di perpustakaan Medayu Agung, JL. Medayu Selatan Gang IV No. 42-44 Surabaya, 18 Mei 2019.
- Wawancara dengan Eddy Samson (85 tahun) di Asem Mulya IV no. 1 Surabaya, 26 Juni 2019.
- Wawancara dengan Amad (92 tahun) di Jalan Hayam Wuruk Baru I no. 43 Surabaya, 4 Juni 2019.
- Wawancara dengan Yusuf Sirad (90 tahun) di Petemon Barat no. 66 Surabaya, 12 Juni 2019.